



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021

DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Esa atas rahmat dan ridho-Nya sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2021.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang memuat tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Program dan kegiatan serta target Kinerja dan pagu indikatif program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini disusun dengan mengakomodasikan seluruh kepentingan baik dari Organisasi Perangkat Daerah dan kepentingan masyarakat yang diambil dari rumusan musrenbang usulan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Kami menyadari bahwa Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Rencana kerja ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yang telah ditetapkan.

Semarang,

2020

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19660427 198603 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
Bab II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2019	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Smg.....	26
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	27
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	42
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	51
3.3 Program dan Kegiatan	52
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	56
Bab V PENUTUP	64

LAMPIRAN

Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang s/d Tahun 2019.....	13
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019.....	23
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	26
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kota Semarang.....	32
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	39
Tabel 3.1 Keterkaitan Program dan Kegiatan OPD dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah.....	51
Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran serta indikator sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	52
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 dan perkraan Maju Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Renja adalah rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam renja PD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana Kerja (Renja) PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Untuk menjalankan amanat tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2021, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2016-2021, serta mendukung Visi dan Misi Walikota Semarang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor Nomor 4866);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
 - k. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
 - l. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- s. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2021, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas OPD.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang tahun 2021 dan Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang serta sebagai pedoman dalam mencapai target Kinerja yang termuat dalam RPJMD Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu tahun 2021.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2019

Bab ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2019, analisi kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2021, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Bab III berisi menelaah terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta merumuskan tujuan dan sasaran yang didasarkan isu-isu penting dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2021

Bab IV berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kerjanya disertai pendanaan indikatif pada Tahun 2021.

Bab V PENUTUP

Bab V berisi penutup dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kualitas Renja yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran selanjutnya. Dalam menyusun Renja yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019 yang berpedoman pada Perubahan II Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Target Perubahan Kedua Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2020 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 7 program dengan 44 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Adapun Capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2019 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2019	%	CAPAIAN TAHUN 2018
Prosentase Koperasi Baik	88 %	88,67 %	100,76	88,41 %
Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25 %	25,80 %	103,2	25,70 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah berhasil mencapai Persentase Koperasi Baik, dari yang ditargetkan 88 % tercapai 88,67 % atau berhasil mencapai target 100,76 %, dan Persentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya dari yang ditargetkan tahun 2019 yaitu 25 % tercapai 25,80 % , atau berhasil mencapai target 103,20 %.

Dengan meningkatnya persentase Koperasi baik dari aspek Kelembagaan, usaha, dan administrasi Keuangannya serta meningkatnya persentase jumlah UMKM yang meningkat nilai omsetnya diharapkan mampu mewujudkan koperasi dan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan penyerapan tenaga kerjaberlandaskan semangat wirausaha serta kemandirian koperasi. Program inovatif yang dikembangkan untuk mendukung adalah I-JUS MELON atau ijin usaha Mikro melalui Online dan Kredit Wibawa bagi Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun Program yang mendukung pencapaian indikator diatas adalah :

1) PROGRAM : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Capaian Kinerja pada Program ini sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	55 %	59,68 %	108,51	56,07 %
2	Persentase Meningkatnya Kualitas produk yang dibina	13 %	14,53 %	111,77	14,49 %

Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase Kualitas Usaha Mikro yang dibina dari yang ditargetkan 55 % menjadi 59,68 %, atau berhasil mencapai target 108,51 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 yang sebesar 56,07 %sedangkan

Persentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 adalah 13 % berhasil tercapai 14,53 % atau berhasil mencapai target sebesar 111,77 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 14,49 %

Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada data dibawah ini :

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Jumlah UMKM	Unit	14.893	17.567
2.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	14.879	17.546
3.	Jumlah UMKM yang dibina	Unit	2.140	2.857
4.	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	25.719	30.357
5.	Jumlah Omset	Rupiah	1.435.111.276.173	1.760.465.984.566
6.	Fasilitasi Permodalan UMKM	Rupiah	6.503.500.000	9.806.500.000

Dengan terlaksananya program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, pelaku usaha mikro semakin meningkat produktifitas dan Kualitas produk serta Manajemen pengelolaan Usahanya sehingga mampu lebih bersaing di pasaran.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Penguatan Mutu Produk Umkm;
- b. Pendampingan Usaha Mikro;
- c. Peningkatan Manajemen Usaha Mikro;
- d. Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan

2) PROGRAM : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Legalitas Pelaku Usaha	35 %	54,50 %	155,72	78,25 %
2.	Persentase akses pembiayaan	30 %	80,14 %	267,13	79,0 %

Untuk fasilitasi legalitas pelaku usaha dengan memberikan kemudahan pelaku usaha memperoleh kepastian hukum akan usaha dan produknya dengan memberikan kemudahan pengurusan IUMK melalui I-Jus Melon, Prosentase Legalitas Pelaku usahapada tahun 2019 yang ditargetkan 35 % dapat tercapai 54,50%, atau berhasil mencapai target 155,72 %. Sedangkan

fasilitasi akses pembiayaan dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan melalui kredit wibawa yang pada tahun 2019 ditargetkan 30 % tercapai 80,14 % atau berhasil mencapai target sejumlah 267,13 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 79,0 %

Dari program yang dilaksanakan ini diharapkan masyarakat/pelaku usaha mampu memberdayakan diri dengan membuka usaha atau menjadi wirausaha baru karena mendapat kemudahan dalam mengakses berbagai fasilitas baik legalitas, permodalan, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya serta mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.

3) PROGRAM : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Koperasi Aktif	88,4 %	88,67 %	100,31	88,41 %
2.	Persentase Koperasi Sehat	12 %	24,6 %	205	8,89 %
3.	Persentase Omset Koperasi	0,6 %	49,89 %	8.315	2,39 %

Pada Tahun 2019 Kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase koperasi aktif dari yang ditargetkan 88,4 % menjadi 88,67 % atau berhasil mencapai target sejumlah 100,31 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 88,41 %. Persentase koperasi sehat dari target yang ditetapkan di tahun 2019 12 % menjadi 24,6 % atau berhasil mencapai target sejumlah 205 %. Sedangkan Persentase omset Koperasi dari target yang ditetapkan di tahun 2019 yaitu 0,6 % yang berhasil tercapai 49,84 % atau berhasil mencapai target sejumlah 8.315 %.

Adapun Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan pada data dibawah ini :

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	618	634
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	699	715
3.	Persentase Koperasi Aktif	Persen	88,41	88,67
4.	Jumlah Omset Koperasi	Rupiah	1.253.347.938.000	1.878.627.483.000
5.	Jumlah Aset Koperasi	Rupiah	1.491.506.932.000	1.700.193.870.000
6.	Fasilitasi Permodalan Koperasi	Rupiah	1.250.000.000	1.500.000.000

Dengan tercapainya target tersebut diatas diharapkan pengelola Koperasi dapat lebih meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha Koperasi agar berfungsi lebih efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain didukung dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi;
- b. Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi;
- c. Pengembangan Usaha Koperasi;
- d. Peningkatan Pengendalian Koperasi;
- e. Penilaian Kesehatan Koperasi;
- f. Fasilitasi Kelembagaan Koperasi;
- g. Pemasarakatan Kelembagaan Koperasi;
- h. Fasilitasi Perijinan Koperasi;
- i. Peningkatan Kepatuhan Koperasi;

4) PROGRAM : Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2019			REALISASI TAHUN 2018
		TARGET	REALISASI	%	
1.	Persentase Akses Pemasaran	20 %	20,35 %	101,75	24,5 %

Pada Tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan persentase akses Pemasaran dari yang ditargetkan 20 % tercapai 20,35 % atau berhasil mencapai target sejumlah 101,75 %. Fasilitasi akses pemasaran dilaksanakan antara lain dengan mengikuti pameran, pelaksanaan kontak dagang, temu usaha dengan pengusaha besar dan Fasilitasi galeri di Kawasan Kota Lama, Gedung Balaikota, Pasar Bulu dan Pasar Spondol,

Pada tahun 2019 Fasilitasi jaringan pemasaran melalui pameran dilaksanakan sebanyak 15 kali di 9 Kabupaten/Kota yaitu di Kab. Demak (Jateng) pada tanggal 27 Februari 2019 dalam rangka Gelar Produk Unggulan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Musrenbangwil Se-Eks Karisidenan Semarang, di Cihampelas Walk-Bandung (Jawa Barat) tanggal 14-17 Maret 2019 dalam rangka Bandung PUKD Expo 2019, di Java mall Semarang pada tanggal 20-26 Maret 2019 dalam rangka Semarang Business & Entrepreneur Expo 2019, di Lombok Epicentrum Mall pada tanggal 21-24 Maret 2019 dalam rangka Indonesia Product Expo 2019, di Hotel PO Semarang pada tanggal 29 Maret 2019 dlm rangka Rakernas APEKSI XIV dan Indonesia City Expo 2019, di Java Mall Semarang tanggal 5-8 April 2019 dalam rangka Gemerlap EXPO, di Jogja Expo Center (Yogyakarta) pada tanggal 25-28 April 2019 dalam rangka Gebyar UMKM, Koperasi dan PKBL Expo ke -11, di DP Mall Semarang tanggal 25-28 April 2019 dalam rangka Semarang Hitz Market, di JCC Jakarta pada tanggal 26-29 Juni 2019 dalam rangka Trisakti Tourism Award (Destinasi Indonesia Expo & Conference) 2019, di lapangan Simpang Lima Semarang pada tanggal 2 – 6 Juli 2019 dalam rangka Indonesia City Expo 2019, di GOR Satria Purwokerto pada tanggal 11-14 Juli 2019 dalam Pameran Hari Koperasi Nasional Expo 2019, di Banjir kanal Barat Semarang pada tanggal 21-24 Agustus 2019 dalam rangka Semarang Introducing Market 2019, di GOR Giri Mandala Wonogiri tanggal 23-25 Agustus 2019 dalam rangka Kriya Dekranasda Propinsi Jawa Tengah, di Mega Mall Batam Center-Batam pada tanggal 1-4 Nopember 2019 dalam rangka Gelar Inovasi Koperasi dan UMKM Indonesia 2019. Disamping itu sebagian dari produk Unggulan UMKM juga telah difasilitasi untuk dapat dipasarkan ke manca negara dengan mengikutikan Pameran Heritage Festival Edmontondi Canada pada tanggal 3 - 5 Agustus 2019.

Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena didukung dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

- a. Peningkatan Akses Pemasaran dan Promosi UMKM,
- b. Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha dan Kemitraan UMKM,
- c. Peningkatan Promosi Produk UMKM ke Luar Negeri,

Secara lebih jelas, rekapitulasi evaluasi dapat dilihat pada tabel sbb :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dan
Pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang s/d Tahun 2019

No	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2020	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN KOPERASI DAN UKM									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	12 bulan	12					12	100%
		Pembayaran rekening telepon dan listrik	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	12 bulan	12					12	100%
		Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan alat tulis kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%

	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12					12	100%
		Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah daerah	12 bulan	12					12	100%
		Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%
	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	100%

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	5 unit	1	0	0	0%	0	0	0%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	5					5	100%
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan gedung kantor	5 unit	5					5	100%
		Pengadaan Peralatan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pengadaan Mebeluer	Pengadaan mebeluer kantor	8 unit	8					8	100%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	30 unit	30					30	100%
		Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	30 unit	30					30	100%
		Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	Pemeliharaan mebeluer kantor	8 unit	8					8	100%

	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100% (40%)	100% (20%)	100% (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	12 bulan	12				12	12	100%
		Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	100%	100% (40%)	100 % (20%)	100 % (20%)	100%	100% (20%)	100% (80%)	80%
	Penyusunan Lkpi Skpd	LKPI SKPD	1 buku	1					1	100%
		LKPI SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Lakip	Lakip SKPD	1 buku	1					1	100%
		Lakip SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	1 buku	1					1	100%
		Laporan keuangan akhir tahun	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	1 buku	1					1	100%
		Laporan keuangan semesteran	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Renja Skpd	Renja SKPD	1 buku	1					1	100%
		Renja SKPD	4 dokumen	1	1	1	100%	1	3	75%
	Penyusunan Renstra Skpd	Renstra SKPD	1 buku	1					1	100%
		Renstra SKPD	1 dokumen	0	0	0	0	1	1	0%
	Penyusunan Rka Dan Dpa	RKA dan DPA, DPPA SKPD	3 buku	3					3	100%
		RKA dan DPA, DPPA SKPD	16 dokumen	8	4	4	100%	4	12	75%

	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Jumlah UMKM yang dibina	3000 UMKM	3.015					3015	100,5%
		Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60%	56,07%	55%	59,68 %	108,51%	58%	58%	96,67%
		Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15%	14,49	13%	14,53%	14,49%	14%	14%	93,33%
Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang dttingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya	360 Org	360						360	100%
Pengembangan Dan Pemberdayaan Umkm Melalui Inkubator Bisnis	Jumlah UMKM yang didampingi pengembangan usahanya	100 Org	100						100	100%
Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya	480 Org	480						480	100%
Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan produknya	100 Org	100						100	100%
Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi	225 Org	225						225	100%
Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	800 Org	350	200	260	130%	200		810	101,25%
Pendampingan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	800 Org	240	200	250	125%	200		690	86,25%

	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	670 Org	70	200	250	125%	200	520	77,6%
	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	550 Org	120	150	60	40%	150	330	60%
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	2400 org	1500	600	1470	245%	600	3570	148,75%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Jumlah Masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha	1580 orang	1650					1650	104,4%
		Jumlah Wirausaha Baru	806 orang	840					840	104,2%
		Prosentase Akses Pembiayaan	40%	79%	30%	80,14%	267,13%	35%	35%	87,5%
		Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50%	78,25%	35%	54,5%	155,13%	40%	40%	80%
	Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm	Jumlah KUMKM yg mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan	50 KUMKM	50					50	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi legalitas pengembangan usahanya	1850 org	1340 org	350 org	200 org	57,14%	350 org	1890 org	102,16%
	Peningkatan Dan Pemberdayaan Kumkm	Meningkatkan Dan Pemberdayaan Kumkm	3 keg	3					3	100%
	Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm	Peningkatan kapasitas pembina KUMKM dalam melaksanakan pembinaan	6 keg	4	1	0	0	1	5	83,33%

	Peningkatan Pengelolaan Usaha Kelompok Masyarakat	Meningkatkan Usaha Kelompok Masyarakat	96 klmpk	96					96	100%
	Pengembangan Kelembagaan Kumkm	Jumlah usaha mikro kecil yang terdata	6.412 UMKM	7408					7408	115,53%
	Pemanfaatan Dan Pengembangan Usaha Kumkm	Jumlah KUMKM penerima bantuan dari pemerintah yang terpantau	600 KUMKM	690					690	115%
	Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Masyarakat Dilingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau	Jumlah Kelompok masyarakat yang difasilitasi pelatihan untuk menjadi wirausaha baru	960 org	1740					1740	181,25%
	Koordinasi Dan Pengembangan Kumkm	Koordinasi pemberdayaan KUMKM dalam pengembangan data dan informasi	15 keg	6	3	0	0	3	9	60%
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	1675 org	1075	425	423	99,53%	425	1925	114,93%
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	88,6%	88,41	88,4%	88,67%	100,31%	88,5%	88,5%	99,8%
Prosentase koperasi sehat		30%	8,89	12%	24,6%	205%	20%	20%	66,67%	
Prosentase Omset Koperasi		0,8%	2,39	0,6%	49,89%	8.315%	0,7%	0,7%	87,5%	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	1.500 Org	1680	300	160	53,33%	350	2190	146%
	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	250 org	100	50	50	100%	50	200	80%

	Pengembangan Usaha Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitas pengembangan usaha	500 Kop	200	100	150	150%	100	450	90%
	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	1.075 Kop	175	300	300	100%	300	775	72,09%
	Fasilitas Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	240 kop						240	100%
	Penilaian Kesehatan Koperasi	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	1.450 Kop	550	300	330	110%	300	1180	81,38%
	Fasilitas Hari Koperasi	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaiannya	7.500 org	4500	1.500	1500	100%	1.500	7500	100%
	Fasilitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	2.025 Kop	825	400	450	112,5%	400	1675	82,72%
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	2.640 org	1020	540	850	157,4%	540	2410	91,29%
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitas pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	545 kop	245	100	320	320%	100	665	122,01%
	Fasilitas Perijinan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitas perijinan koperasi	520 kop	160	120	270	225%	120	590	113,5%
	Fasilitas Informasi Koperasi	Pengembangan data dan informasi koperasi	16 keg	4	4	4	100%	4	12	75%
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	400 kop	100	100	90	90%	100	290	72,5%

	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	600 kop	150	150	160	106,67%	150	460	76,67%
	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	78,5%	88,17					88,17%	88,17%
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat yang diberi sosialisasi perkoperasian	450 org	450					450	100%
	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberi pembinaan kelembagaan	500 kop	500					500	100%
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran koperasi dan perijinan	115 kop	115					115	100%
	PROGRAM Peningkatan Produktivitas Dan Pengembangan Produk UMKM	Jumlah UMKM yang dibina	1500 UMKM	1500 UMKM					1500	100%
	Peningkatan Dan Pengembangan Kualitas Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kewirausahaan dan ketrampilannya	330 org	330					330	100%
	Peningkatan Manajemen Umkm	Jumlah UMKM yang ditingkatkan manajemen usahanya	300 org	360					360	100%
	Penguatan Mutu Produk Umkm	Jumlah UMKM yang difasilitasi	100 org	100					100	100%

		pengembangan %produknya								
	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	90 UMKM	90					90	100%
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah	6 provinsi	6					6	100%
		Prosentase Akses Pemasaran	23%	24,5 %	20	20,35	101,75%	21	21	86,96%
	Pendampingan Dan Peningkatan Usaha Umkm	Jumlah UMKM yang didampingi	240 org	240					240	100%
	Peningkatan Akses Pemasaran Dan Promosi Produk Umkm	Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	185 UMKM	185					185	100%
	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	450 UMKM	250	100	50	50%	100	400	88,89%
	Peningkatan Promosi Produk Umkm Ke Luar Negeri	Produk Umkm yang mendapat fasilitasi promosi ke Luar Negeri	8 UMKM	8					8	100%
	Peningkatan Pembinaan Produk Umkm Unggulan Daerah	Produk Umkm Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	110 UMKM	110					110	100%
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	1.200 UMKM	400	300	250	83,33%	300	950	79,17%
	Perluasan Akses Pasar	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	400 UMKM	200	100	60	60%	100	360	90%

Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	17.961.991.000	16.926.039.192	94,23	1.035.951.808
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.490.721.000	7.947.412.055	93,60	543.308.945
	BELANJA PEGAWAI				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.359.531.000	3.177.497.430	94,58	182.033.570
2	Tambahan Penghasilan PNS	5.131.190.000	4.769.914.625	92,96	361.275.375
	BELANJA LANGSUNG	9.471.270.000	8.978.627.137	94,80	492.642.863
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.680.708.000	2.438.224.574	90,95	242.483.426
002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	92.400.000	63.108.227	68,30	29.291.773
006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	8.000.000	5.677.425	70,97	2.322.575
010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	637.449.000	498.148.250	78,15	139.300.750
011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.935.000	37.474.000	83,40	7.461.000
014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000	10.446.000	99,49	54.000
015	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000	100,00	0
017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	1.272.475.000	1.212.145.810	95,26	60.329.190
018	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	489.000.000	488.857.760	99,97	142.240
028	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	60.000.000	100,00	0
154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	62.349.000	58.767.102	94,26	3.581.898
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	454.286.000	366.206.546	80,61	88.079.454
009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	62.616.000	62.050.900	99,10	565.100
024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	299.670.000	225.135.646	75,13	74.534.354
026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	42.000.000	34.805.000	82,87	7.195.000
028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	44.215.000	88,43	5.785.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	285.600.000	276.212.250	96,71	9.387.750
005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	282.500.000	273.620.000	96,86	8.880.000
006	Penyusunan Lkpi Skpd	600.000	570.000	95,00	30.000
010	Penyusunan Lakip	500.000	447.250	89,45	52.750
020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	500.000	292.500	58,50	207.500
022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	500.000	431.750	86,35	68.250
028	Penyusunan Renja Skpd	500.000	427.750	85,55	72.250
030	Penyusunan Rka Dan Dpa	500.000	423.000	39,05	77.000
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.299.418.000	1.263.126.100	97,21	36.291.900
021	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	78.179.000	61.526.500	78,70	16.652.500
022	Pendampingan Usaha Mikro	99.175.000	98.750.000	99,57	425.000
023	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	107.613.000	104.380.000	97,00	3.233.000
024	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	54.036.000	51.273.500	94,89	2.762.500
025	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	960.415.000	947.196.100	98,62	13.218.900
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM	533.927.000	521.166.000	97,61	12.761.000
014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	150.023.000	144.499.500	96,32	5.523.500
029	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	383.904.000	376.666.500	98,11	7.237.500
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.156.444.000	2.110.556.167	97,87	45.887.833
016	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	609.280.000	586.225.167	96,22	23.054.833
017	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	72.745.000	72.745.000	100,00	0
018	Pengembangan Usaha Koperasi	105.175.000	101.575.000	96,58	3.600.000
019	Peningkatan Pengendalian Koperasi	26.460.000	26.460.000	100,00	0
021	Penilaian Kesehatan Koperasi	61.478.000	61.478.000	100,00	0
022	Fasilitasi Hari Koperasi	545.650.000	544.994.000	99,88	656.000
023	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	91.033.000	75.527.000	82,97	15.506.000
024	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	139.406.000	138.879.000	99,62	527.000
026	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	97.572.000	97.466.000	99,89	106.000
027	Fasilitasi Perijinan Koperasi	38.525.000	38.525.000	100,00	0
028	Fasilitasi Informasi Koperasi	128.328.000	128.170.000	99,88	158.000

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE (%)	SELISIH
029	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	209.470.000	209.470.000	100,00	0
030	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	31.322.000	29.042.000	92,72	2.280.000
21	Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha Umkm	2.060.887.000	2.003.135.500	97,20	57.751.500
002	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	9.227.000	7.722.500	83,69	1.504.500
005	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	2.047.241.000	1.990.994.000	97,25	56.247.000

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2019, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 7 program dan 39 kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Semarang adalah sebesar **Rp 17.961.991.000,-** . Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 16.926.039.192,- (94,23%) dengan sisa sebesar Rp 1.035.951.808 (5,77%). dengan uraian sebagai berikut :

- a. **Belanja Tidak Langsung;** anggaran sebesar Rp 8.490.721.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.947.412.055,- (93,60%) dan sisa anggaran sebesar Rp 543.308.945,- (6,84 %)

Untuk Belanja Tidak Langsung, sisa anggaran disebabkan oleh penyesuaian gaji dan tunjangan dengan jumlah pegawai karena pensiun dan mutasi serta aturan yang berlaku.

- b. **Belanja Langsung;** anggaran sebesar Rp 9.471.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp 8.978.627.137,- (94,80%) dan sisa anggaran sebesar Rp 492.642.863,- (5,20%).

Untuk Belanja Langsung, sisa anggaran umumnya dikarenakan adanya efisiensi belanja atau menyesuaikan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain langganan listrik, telpon dan STNK, serta adanya selisih harga dengan harga pasar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah tumbuhnya koperasi yang aktif dan sehat serta pelaku usaha Mikro yang mandiri dan berdaya saing.

Hal itu berusaha diwujudkan dengan upaya meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM pengelola Koperasi yang kompetitif, Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha Koperasi untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi serta peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi pelaku usaha mikro di kota semarang melalui pelayanan 4P yaitu Pendampingan, Pelatihan, Pemasaran dan pembiayaan guna menumbuhkan produktivitas UKM.

Pada Perubahan II Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang 2016-2021, terdapat 10 (sepuluh) pelayanan program kerja dinas, yaitu :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Koperasi Baik	-	-	88%	88%	88%	88%	88,41 %	88,67 %	88%	88%	Sangat tinggi
2	Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	-	-	23%	25%	28%	32%	25,7%	25,80 %	28%	32%	Sangat tinggi
3	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	-	-	53%	55%	58%	60%	56,07 %	59,68 %	58%	60%	Sangat tinggi
4	Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	-	-	12%	13%	14%	15%	14,49 %	14,53 %	14%	15%	Sangat tinggi
5	Prosentase Akses Pembiayaan	-	-	25%	30%	35%	40%	79,0%	54,50 %	35%	40%	Sangat tinggi
6	Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	-	-	30%	35%	40%	50%	78,25 %	80,14 %	40%	50%	Sangat tinggi
7	Prosentase koperasi aktif	-	-	88,3%	88,4%	88,5%	88,6%	88,41 %	88,67 %	88,5%	88,6%	Sangat tinggi
8	Prosentase koperasi sehat	-	-	6%	12%	20%	30%	8,89%	24,6 %	20%	30%	Sangat tinggi
9	Prosentase Omset Koperasi	-	-	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	2,39%	49,89 %	0,7%	0,8%	Sangat tinggi
10	Prosentase Akses Pemasaran	-	-	18,5%	20%	21%	23%	24,5%	20,35 %	21%	23%	Sangat tinggi

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai salah satu dinas yang melaksanakan Urusan Wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka perlu adanya sinergitas program dan kegiatan perangkat daerah di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dengan propinsi dan kementerian dalam bentuk pembinaan kepada Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan prosentase koperasi aktif, meningkatkan omset pelaku usaha dan jiwa kewirausahaan serta memberikan pelatihan kepada pelaku usaha produk unggulan daerah *one village one product* (OVOP).

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang mandiri tangguh dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu Bergeraknya roda perekonomian daerah. Seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi dan Usaha Mikro yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut.

Selain itu masih perlunya pengembangan produk unggulan daerah berbasis UMKM dan ekonomi kreatif, terutama untuk menjaga potensi resesi ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19, serta dampaknya terhadap sektor formal dan informal. Daya saing daerah dalam bidang ekonomi yang masih perlu didorong dan diperkuat, dengan akar permasalahan yaitu : belum optimalnya keterlibatan UKM dalam pengembangan program Ekonomi Kreatif, perlunya peningkatan akses permodalan, pemasaran produk koperasi dan IKM, serta minimnya kompetisi usaha kecil menengah dalam kegiatan ekspor produknya; dan perlunya Optimalisasi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan (SPPN), terdapat perubahan pada pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 yang mempunyai visi “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**” telah diupayakan agar selaras dengan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Adapun beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya antara lain:

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang

Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

Kota Perdagangan dan Jasa mengandung arti bahwa Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin meningkat, *nilai investasi yang semakin besar*, serta persentase kawasan banjir dan rob yang semakin menurun.

Berdasarkan Tupoksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian Misi Ke 4 yaitu **memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif dengan meningkatkan produktifitas ekonomi lokal serta menumbuhkan wirausaha baru** sehingga berdampak pada program pengentasan kemiskinan dan pengurangan Pengangguran di Kota Semarang agar target laju pertumbuhan ekonomi di kota semarang pada tahun 2021 dapat terealisasi.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang menghadapi tantangan antara lain :

- a) Meningkatkan kualitas SDM KUMKM dalam menghadapi perkembangan teknologi Informasi
- b) Meningkatkan Kualitas SDM Pengelola Koperasi untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan koperasi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan Jangkauan pemasaran produk KUMKM yang lebih luas.
- d) Meningkatkan pemahaman pelaku KUMKM terhadap aturan mengakses permodalan.
- e) Meningkatkan produktifitas Usaha yang dilakukan pelaku usaha Mikro sehingga tidak bersifat /berskala rumah tangga saja

Sedangkan peluang yang dimiliki antara lain :

- a) Komitmen dan dukungan keberpihakan Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi dan UMKM.
- b) Sumber daya alam potensi lokal yang beragam dan melimpah.
- c) Tehnologi informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas.

5. Formulasi isu-isu penting (rekomendasi dan catatan strategis) yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021 :

- a) Daya saing ekonomi diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan kunjungan wisatawan melalui mengembangkan destinasi wisata dan seni budaya lokal, **pengembangan sistem pendukung usaha bagi Koperasi dan UKM melalui akses permodalan** dan pengembangan IKM.

Rekomendasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang :

1. Dalam rangka penguatan daya saing ekonomi daerah maka perlu direncanakan kegiatan guna meningkatkan produksi Usaha mikro melalui peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga non Perbankan, peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi serta kemitraan KUMKM dengan pengusaha besar.
2. Perlu dibangun sistem data yang valid terkait jumlah Koperasi dan pelaku usaha mikro di kota semarang sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kota Semarang
3. Daya saing ekonomi, dan peningkatan kesempatan berusaha diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan lingkup cara peningkatan jaringan distribusi produk, peningkatan sarana dan event yang langsung dapat dinikmati oleh pelaku usaha kecil dan mikro terutama yang terdampak oleh COVID-19, peningkatan kunjungan wisatawan melalui pengembangan serta promosi destinasi wisata dan seni budaya lokal, pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan IKM melalui akses permodalan, branding serta pemasaran produk, juga mendorong ekspor produk UMKM agar mampu bersaing dipasar internasional.
4. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2021
Prioritas Daerah tahun 2021 adalah Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dijabarkan pada Fokus 4 yaitu Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil, melalui upaya:
 - Peningkatan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat mengakses permodalan;
 - Peningkatan event untuk pemasaran produk usaha mikro dan kecil.
 - Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Daerah.
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif.
 - Sinergitas UMKM dengan Koperasi.

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD Kota Semarang Tahun 2021

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kota Semarang Tahun 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2021.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Walikota yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maka program dan kegiatan yang masih mendukung pencapaian sasaran dan indikator yang terdapat di RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 serta indikator program dan kegiatan yang terdapat Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2016-2021 masih tetap digunakan karena relevan dilaksanakan untuk mencapai target indikator tersebut.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kota Semarang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG				12.893.796.000	BELANJA LANGSUNG				10.268.007.000	
	PROGRAM PELAYANAN ADM INISTRASI PERKANTORAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3.535.084.000	PROGRAM PELAYANAN ADM INISTRASI PERKANTORAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2.815.173.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembayaran rekening telepon dan listrik)	100%	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembayaran rekening telepon dan listrik)	100%	95.562.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas /operasional	100%	14.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas /operasional	100%	11.149.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan alat tulis kantor	100%	498.232.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan alat tulis kantor	100%	396.768.000	
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	50.000.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	39.818.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	100%	20.561.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	100%	16.374.000	

	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100%	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	100%	7.964.000	
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	1.629.991.000	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	100%	1.298.047.000	
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	100%	750.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	100%	597.264.000	
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	100%	355.100.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	100%	282.785.000	
	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	100%	87.200.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	100%	69.442.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	670.390.000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	601.502.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	103.100.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	82.104.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	197.800.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pengadaan peralatan gedung kantor	100%	157.519.000	
	Pemeliharaan Rutin/berkala	Dinas Koperasi dan	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	335.560.000	Pemeliharaan Rutin/berkala	Dinas Koperasi dan	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	100%	267.224.000	

	Kendaraan Dinas / Operasional	Usaha Mikro				Kendaraan Dinas / Operasional	Usaha Mikro				
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	68.860.000	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	54.837.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100%	39.818.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	285.600.000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	214.592.000	
	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	100%	282.500.000	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	100%	211.806.000	
	Penyusunan Lkjp Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	LKPJ SKPD	1 dokumen	600.000	Penyusunan Lkjp Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	LKPJ SKPD	1 dokumen	398.000	
	Penyusunan Lakip	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Lakip SKPD	1 dokumen	500.000	Penyusunan Lakip	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Lakip SKPD	1 dokumen	398.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	398.000	
	Penyusunan Pelaporan	Dinas Koperasi dan	Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dinas Koperasi dan	Laporan keuangan semesteran	1 dokumen	398.000	

	Keuangan Semesteran	Usaha Mikro					Usaha Mikro				
	Penyusunan Renja Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Renja SKPD	1 dokumen	500.000	Penyusunan Renja Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Renja SKPD	1 dokumen	398.000	
	Penyusunan Renstra Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Renstra SKPD	1 dokumen	500.000	Penyusunan Renja Skpd	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Renja SKPD	1 dokumen	398.000	
	Penyusunan Rka Dan Dpa	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RKA dan DPA, DPPA SKPD	4 dokumen	500.000	Penyusunan Rka Dan Dpa	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RKA dan DPA, DPPA SKPD	4 dokumen	398.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60%	1.401.478.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	60%	1.116.070.000	
			Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15%				Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina	15%		
	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	200 org	648.785.000	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	200 org	516.662.000	Terkait Kampung Tematik
	Pendampingan Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	200 org	121.350.000	Pendampingan Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	200 org	96.637.000	
	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	200 org	113.831.000	Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	200 org	90.650.000	
	Peningkatan Pembinaan Produk	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah	150 org	172.040.000	Peningkatan Pembinaan Produk	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah	150 org	137.004.000	

	Usaha Mikro Unggulan Daerah		yang mendapat pembinaan			Usaha Mikro Unggulan Daerah		yang mendapat pembinaan			
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kota Semarang	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	600 org	345.472.000	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kota Semarang	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	600 org	275.117.000	Terkait Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas Data Pilah Tematik
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Akses Pembiayaan	40%	706.931.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Akses Pembiayaan	40%	562.966.000	
			Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50%				Prosentase Legalitas Pelaku Usaha	50%		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	350 org	183.821.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	350 org	146.386.000	Terkait Data Pilah Tematik
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	425 org	523.110.000	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Kota Semarang	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	425 org	416.580.000	Terkait Data Pilah Tematik
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi aktif	88,6%	1.806.303.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase koperasi aktif	88,6%	1.438.454.000	
			Prosentase koperasi sehat	30%				Prosentase koperasi sehat	30%		
			Prosentase Omset Koperasi	0,8%				Prosentase Omset Koperasi	0,8%		
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Semarang	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	400 org	230.203.000	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kota Semarang	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	400 org	183.323.000	

	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Kota Semarang	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	50 org	28.820.000	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Kota Semarang	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	50 org	22.951.000	
	Pengembangan Usaha Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	100 kop	249.640.000	Pengembangan Usaha Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	100 kop	198.801.000	
	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	300 kop	46.700.000	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	300 kop	37.190.000	
	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Semarang	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	300 kop	57.800.000	Penilaian Kesehatan Koperasi	Kota Semarang	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	300 kop	46.029.000	
	Fasilitasi Hari Koperasi	Kota Semarang	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaianannya	1500 org	526.558.000	Fasilitasi Hari Koperasi	Kota Semarang	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaianannya	1500 org	419.326.000	
	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	400 kop	94.270.000	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	400 kop	75.072.000	Terkait Kampung Tematik
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kota Semarang	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	540 org	153.325.000	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kota Semarang	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	540 org	122.101.000	Terkait Kampung Tematik
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	100 kop	31.455.000	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	100 kop	25.049.000	
	Fasilitasi Perijinan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	120 kop	121.620.000	Fasilitasi Perijinan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	120 kop	96.852.000	

	Fasilitasi Informasi Koperasi	Kota Semarang	Pengembangan data dan informasi koperasi	4 keg	124.612.000	Fasilitasi Informasi Koperasi	Kota Semarang	Pengembangan data dan informasi koperasi	4 keg	99.235.000	
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	100 kop	94.600.000	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	100 kop	75.335.000	
	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	150 kop	46.700.000	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Kota Semarang	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	150 kop	37.190.000	
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Akses Pemasaran	23%	4.419.210.000	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Prosentase Akses Pemasaran	23%	3.519.250.000	
	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	Kota Semarang dan luar daerah	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	100 UMKM	78.913.000	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	Kota Semarang dan luar daerah	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	100 UMKM	62.843.000	
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	Kota Semarang dan luar daerah	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	300 UMKM	4.255.305.000	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	Kota Semarang dan luar daerah	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	300 UMKM	3.388.723.000	disabilitas Tematik
	Perluasan Akses Pasar	Kota Semarang	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	100 UMKM	84.992.000	Perluasan Akses Pasar	Kota Semarang	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	100 UMKM	67.684.000	

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat kepada Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang merupakan hasil dari usulan-usulan yang terangkum dalam Musrenbang Kecamatan. Usulan-usulan tersebut diakomodir dalam program dan kegiatan Dinas Dinas Koperasi dan usaha Mikro setelah melalui penelaahan akan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi pokok serta kewenangan Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang, serta disinkronkan dengan sasaran dan target yang harus dicapai Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2021 berdasarkan P-Renstra Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan anggaran. Sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, sehingga untuk mengakomodir usulan-usulan tersebut Dinas koperasi dan Usaha Mikro melakukan verifikasi dengan menetapkan skala prioritas kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas kegiatan pembangunan daerah di kota Semarang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2021 yaitu antara lain yang mendukung kampung Tematik serta Program Gerai Kopimi.

Adapun hasil usulan dari musrenbang Kecamatan yang diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOM PETITIF USAHA KECIL MENENGAH				
	Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Kec. Semarang Barat, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	3 paket	

	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	1 paket	
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kec. Semarang Barat, Kec. Semarang Timur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	6 paket	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kec. Ngaliyan	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	1 paket	
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Kec. Semarang Selatan, Kec. Semarang Barat, Kec. Candisari, Kec. Banyumanik, Kec. Gayamsari, Kec. Pedurungan,	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	6 paket	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI					
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	1 paket	
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kec. Ngaliyan	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	1 paket	
	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Kec. Banyumanik	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	1 paket	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UM KM					
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	Kec. Semarang Barat, Kec. Tembalang, Kec. Banyumanik, Kec. Ngaliyan	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	4 paket	

	Perluasan Akses Pasar	Kec. Semarang Barat, Kec. Gajahmungkur, Kec. Tembalang, Kec. Banyumank, Kec. Ngaliyan, Kec. Gayamsari	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	6 paket	
--	-----------------------	---	---	---------	--

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2021 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Untuk tahun 2021 tema yang diangkat dalam RKP adalah “**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**”. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional, dimana dilakukan penekanan pada PN 1, PN 3, PN 5, dan PN 6. Selain itu RKP Tahun 2021 mengusung beberapa poin penting agar memberikan manfaat yang lebih dirasakan masyarakat, antara lain untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) pada RPJMN 2020 - 2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, dan pelaksanaan *Major Project* dilakukan sesuai kesiapan dan tahapan proyek.

Adapun Prioritas Nasional beserta beberapa *Major Project* dalam RKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas;

MP 2 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;

MP 3 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan 31 Smelter;

MP 4 Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Pusat Kegiatan Strategis Nasional; PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke.

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0;
MP 2 Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh;

MP 3 Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, tidak terdapat *major project*, namun tetap memberikan dukungan terhadap beberapa *major project* pada PN 1, PN 2, dan PN 3.

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu.

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

PN 7 Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT.

Untuk target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2021 antara lain meliputi :

- a. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,5 - 5,5 %;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,7 - 9,1 %;
- c. Tingkat Kemiskinan sebesar 9,2 - 9,7 %;
- d. Rasio Gini sebesar 0,377 - 0,379;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 - 72,95;

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dimana tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD, serta mengacu pada RKP Tahun 2021 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional.

Visi pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**”. Pada tahun 2021 arah kebijakan pembangunan disesuaikan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19. Terkait hal tersebut, pembangunan tahun 2021 diarahkan pada “**Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM**”, dijabarkan dalam prioritas daerah yang juga telah disesuaikan sebagai berikut :

P1 Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup; dengan fokus pada :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian perkebunan dan peternakan, serta kualitas produk pertanian;
- b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan;
- c. Penguatan ketersediaan pangan;
- d. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
- e. Peningkatan pariwisata daerah;

- f. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif;
- g. Memacu konsumsi rumah tangga dan korporasi;
- h. Penguatan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran distribusi barang-jasa, serta konektivitas antar wilayah;
- i. Pengawasan dan pemantapan pelaksanaan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
- j. Melanjutkan dan mempertahankan kualitas lingkungan yang diindikasikan membaik pada masa terjadinya pandemi Covid-19 dengan penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

P2 Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; dengan fokus pada:

- a. Pengurangan kemiskinan : penyediaan *basic life access*, penguatan *sustainable livelihood*, serta penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan / TKPKD dengan Satgas Kemiskinan;
- b. Menurunkan angka pengangguran : peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan perlindungan, kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja.

P3 Pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing; dengan fokus pada :

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- b. Penguatan *health security* masyarakat dan sistem kesehatan daerah;
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan;

- d. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan dan pelayanan bagi kelompok disabilitas serta lansia produktif dan non produktif.

P4 Penguatan ketahanan bencana; dengan fokus pada :

- a. Mitigasi melalui perencanaan kebencanaan, penyadaran risiko, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan kerentanan;
- b. Respon darurat melalui pusat manajemen krisis, sistem logistik serta hunian darurat;
- c. Pemulihan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi serta jaring pengaman sosial dan ekonomi;
- d. Adaptasi transformatif melalui adaptasi lintas sektor termasuk bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi dan sektor lain yang terdampak untuk mewujudkan kemampuan adaptasi masyarakat menuju kondisi “*new normal*”.

P5 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah; dengan fokus pada :

- a. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampaknya terutama pasca pandemi Covid-19;
- b. Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal keuangan daerah terutama pada masa pemulihan pasca pandemi Covid-19;
- c. Peningkatan kondusivitas wilayah dengan menjaga kebersamaan dan gotong royong di masyarakat untukantisipasi dampak sosial akibat pandemi Covid-19.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 antara lain meliputi :

- a. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15 %;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 78;
- c. Angka Kemiskinan sebesar 11,94-11,02 %;
- d. Indeks Gini sebesar 0,365;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,94 – 5,67 %;
- f. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,80 - 4,80 %;
- g. Inflasi sebesar $3,0 \pm 1$ %;
- h. PDRB per kapita sebesar 41,87 juta rupiah;
- i. Indeks Williamson sebesar 0,595;
- j. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,49;
- k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,12;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,02;
- m. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103,00.

Dengan memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum dalam RPJMD Perubahan Kota Semarang Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 serta prioritas Pembangunan Nasional maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2021 berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, dimana tahun 2021 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD, serta arahan kebijakan dari Kepala Daerah. Sedangkan secara khusus, prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2021 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang diarahkan pada (1) Pemulihan daya beli masyarakat; (2) pemulihan sektor utama penggerak perekonomian; (3) penguatan sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana; (4) penanganan masalah sosial dan kemiskinan sebagai dampak COVID-19; (5) penguatan data dan integrasi program / kegiatan;

2. Prioritas kegiatan tahun 2020 yang tertunda karena adanya refocusing dan realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2021;
3. Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD tetap dapat tercapai di tahun 2021 sebagai tahun akhir RPJMD;
4. Memastikan indikator RPJMD yang statusnya “akan tercapai” untuk terealisasi capaiannya di 2021;
5. Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, tidak sekedar capaian kuantitatif;
6. Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal;
7. Meningkatkan keunggulan kompetitif pada sektor ekonomi unggulan, terutama pada sektor pariwisata;
8. Dukungan kepada pelaksanaan implementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Terkait hal-hal tersebut di atas, untuk rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2021 adalah “**Perwujudan Semarang Hebat**” dengan lima prioritas daerah, yaitu :

P1 Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan;
- 2) Peningkatan Produktifitas Pangan;
- 3) Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi;
- 4) Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil;**
- 5) Peningkatan Kunjungan Wisatawan.

P2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; dijabarkan dalam fokus sebagai berikut:

- 6) Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas;

- 7) Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan;
- 8) Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Rujukan;
- 9) Peningkatan Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular;
- 10) Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan;
- 11) Peningkatan Akses, Perlindungan, Pemberdayaan dan pelayanan Bagi Kelompok Disabilitas, dan Lansia.

P3 Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran;

dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- 12) Percepatan Penurunan Kemiskinan;
- 13) Perlindungan PMKS;
- 14) Penguatan Kampung Tematik;
- 15) Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial;
- 16) Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

P4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah;

dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- 17) Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 18) Peningkatan Stabilitas Wilayah serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- 19) Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah;
- 20) Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

P5 Perkuatan Infrastruktur Kota yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan memperhatikan Aspek Keberlanjutan dan Resiko Bencana;

dijabarkan dalam fokus sebagai berikut :

- 21) Dukungan Pelaksanaan Perpres No. 79/2019;
- 22) Peningkatan Sarana Prasarana Strategis Perkotaan;
- 23) Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru;
- 24) Peningkatan Penggunaan Transportasi Publik;
- 25) Penurunan Luasan Kawasan Kumuh;
- 26) Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman;

- 27) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir;
- 28) Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana;
- 29) Pengembangan Kawasan Strategis;
- 30) Pengembangan Fungsi Ruang Terbuka.

Adapun target pembangunan berupa Indikator Semarang Hebat yang ditetapkan Kota Semarang pada tahun 2021 antara lain meliputi:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,50 %;
- b. Kontribusi Kategori-kategori yang Terkait dengan Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB sebesar 31,41 %;
- c. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,54 %;
- d. Jumlah Nilai Investasi sebesar 21.924.000 juta rupiah;
- e. Persentase Kawasan Banjir dan Rob sebesar 3,40 %;
- f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,23;
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 97,56;
- h. Angka Kemiskinan sebesar 4,53 %;
- i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,57 %;
- j. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar >72;

Program dan kegiatan yang disusun oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas-prioritas tersebut, baik prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan Program dan Kegiatan OPD dengan Prioritas Pembangunan Nasional maupun Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Keterkaitan Program dan Kegiatan OPD dengan Prioritas Pembangunan Nasional Maupun Daerah

Prioritas Nasional Prioritas 1 : <i>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</i> a. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas;.
↓
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Prioritas 1 : <i>Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup</i> d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri Kecil, Mikro dan Menengah
↓
Prioritas dan Fokus pada RKPD Kota Semarang Tahun 2021 Prioritas 1 : <i>Penguatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</i> 4. Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro dan Kecil ;

3.2. Tujuan dan sasaran renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada hakekatnya merupakan penjabaran dalam mendukung pencapaian dari misi ke 4 untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kota Semarang selama kurun waktu 2016 – 2021, sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan, serta meningkatkan produktifitas dan daya saing UKM.

b. Sasaran

Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro dengan meningkatkan jumlah koperasi aktif, peningkatan omset koperasi dan usaha mikro serta mendorong pelaku usaha mikro untuk naik kelas.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan Koperasi dan Usaha Mikro yang berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi serta Nilai Omset Usaha Mikro	Prosentase Koperasi Baik	11%	88%	88%	88%	88%
			Prosentase jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	21%	23%	25%	28%	32%

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

4.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2021 yaitu :
- ✓ Target RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021;
 - ✓ Target Renstra Perubahan II Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2016-2021;
 - ✓ Program Unggulan dan Prioritas Kepala Daerah pada OPD yaitu I-Jus Melon, Kredit Wibawa, Galeri dan Klinik Bisnis Usaha Mikro;
 - ✓ Mendukung Program Kampung Tematik serta Hasil Musrenbang;

- ✓ Kegiatan serta Penganggaran dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro harus perspektif Gender

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Jumlah program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak **7 (tujuh) program** dengan **44 (empat puluh empat) kegiatan** yang terdiri dari terdiri dari 21 (dua puluh satu) kegiatan rutin dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1.1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- 1.2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
- 1.3 Penyediaan alat tulis kantor
- 1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 1.5 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.7 Penyediaan makanan dan minuman
- 1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 1.9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 1.10 Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 2.1 Pengadaan perlengkapan Gedung kantor
- 2.2 Pengadaan peralatan Gedung kantor
- 2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- 2.4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor
- 2.5 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan Gedung kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 3.1 Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
- 3.2 Penyusunan LPKJ SKPD

- 3.3 Penyusunan LAKIP
- 3.4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 3.5 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- 3.6 Penyusunan RENSTRA SKPD
- 3.7 Penyusunan RENJA SKPD
- 3.8 Penyusunan RKA dan DPA

4. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

- 4.1 Penguatan moto produk usaha mikro
- 4.2 Pendampingan usaha mikro
- 4.3 Peningkatan manajemen usaha mikro
- 4.4 Peningkatan pembinaan produk usaha mikro unggulan daerah
- 4.5 Peningkatan kapasitas kewirausahaan

5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

- 5.1 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro
- 5.2 Fasilitasi akses pembiayaan bagi usaha mikro

6. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- 6.1 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi
- 6.2 Peningkatan manajemen pengawasan koperasi
- 6.3 Pengembangan Usaha Mikro
- 6.4 Peningkatan Pengendalian Koperasi
- 6.5 Penilaian Kesehatan Koperasi
- 6.6 Fasilitasi Hari Koperasi
- 6.7 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi
- 6.8 Permasalahatan Kelembagaan Koperasi
- 6.9 Advokasi dan Pendampingan Koperasi
- 6.10 Fasilitasi Perijinan Koperasi
- 6.11 Fasilitasi Informasi Koperasi
- 6.12 Peningkatan Kepatuhan Koperasi
- 6.13 Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi

7. Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha UMKM

- 7.1 Peningkatan perluasan jaringan usaha dan kemitraan UMKM
- 7.2 Fasilitasi promosi produk UMKM
- 7.3 Perluasan akses pasar

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebanyak 7 program, yang terdiri dari 3 program penunjang (program pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 4 program pelaksanaan / pembangunan;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2021 adalah sebanyak 46 kegiatan, yang terdiri dari 23 kegiatan penunjang (kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin), dan 23 kegiatan pelaksanaan / pembangunan.
3. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebesar Rp 10.268.007.000,- yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang, dengan perincian :
 - a. Rp 3.631.267.000,- untuk program dan kegiatan penunjang (program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah / eks rutin).
 - b. Rp 6.636.740.000,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan / pembangunan.

Adapun rencana program dan kegiatan pada Renja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				10.268.007.000				12.893.796.000
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	2.815.173.000	APBD Kota Semarang		100%	3.535.084.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	95.562.000	APBD Kota Semarang		100%	120.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	11.149.000	APBD Kota Semarang		100%	14.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	396.768.000	APBD Kota Semarang		100%	498.232.000
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	39.818.000	APBD Kota Semarang		100%	50.000.000

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	16.374.000	APBD Kota Semarang		100%	20.561.000
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	7.964.000	APBD Kota Semarang		100%	10.000.000
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	1.298.047.000	APBD Kota Semarang		100%	1.629.991.000
		Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	597.264.000	APBD Kota Semarang		100%	750.000.000
		Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	282.785.000	APBD Kota Semarang		100%	355.100.000
		Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	69.442.000	APBD Kota Semarang		100%	87.200.000
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	601.502.000	APBD Kota Semarang		100%	755.320.000
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	82.104.000	APBD Kota Semarang		100%	103.100.000

		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	157.519.000	APBD Kota Semarang		100%	197.800.000
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	267.224.000	APBD Kota Semarang		100%	335.560.000
		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	54.837.000	APBD Kota Semarang		100%	68.860.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	39.818.000	APBD Kota Semarang		100%	50.000.000
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	214.592.000	APBD Kota Semarang		100%	269.470.000
		Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	211.806.000	APBD Kota Semarang		100%	282.500.000
		Penyusunan Lkjp Skpd	LKPJ SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	600.000
		Penyusunan Lakip	Lakip SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000

		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan keuangan akhir tahun	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Laporan keuangan semesteran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
		Penyusunan Renja Skpd	Renja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		1 dokumen	500.000
		Penyusunan Renstra Skpd	Renstra SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		-	-
		Penyusunan Rka Dan Dpa	RKA dan DPA, DPPA SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4 dokumen	398.000	APBD Kota Semarang		4 dokumen	500.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOM PETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro yang dibina	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	60%	1.116.070.000	APBD Kota Semarang		60%	1.401.478.000
			Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina		15%			15%		
		Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	Kota Semarang	200 org	516.662.000	APBD Kota Semarang		200 org	648.785.000
		Pendampingan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	Kota Semarang	200 org	96.637.000	APBD Kota Semarang		200 org	121.350.000
		Peningkatan Manajemen Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	Kota Semarang	200 org	90.650.000	APBD Kota Semarang		200 org	113.831.000

	Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	Kota Semarang	150 org	137.004.000	APBD Kota Semarang		150 org	172.040.000
	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Kota Semarang	600 org	275.117.000	APBD Kota Semarang		600 org	345.472.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Prosentase Akses Pembiayaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	40%	562.966.000	APBD Kota Semarang		40%	706.931.000
		Prosentase Legalitas Pelaku Usaha		50%				50%	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	Kota Semarang	350 org	146.386.000	APBD Kota Semarang		350 org	183.821.000
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	Kota Semarang	425 org	416.580.000	APBD Kota Semarang		425 org	523.110.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Prosentase koperasi aktif	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	88,6%	1.438.454.000	APBD Kota Semarang		88,6%	1.806.303.000
		Prosentase koperasi sehat		30%				30%	
		Prosentase Omset Koperasi		0,8%				0,8%	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	Kota Semarang	400 org	183.323.000	APBD Kota Semarang		400 org	230.203.000
	Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	Kota Semarang	50 org	22.951.000	APBD Kota Semarang		50 org	28.820.000
	Pengembangan Usaha Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	Kota Semarang	100 kop	198.801.000	APBD Kota Semarang		100 kop	249.640.000
	Peningkatan Pengendalian Koperasi	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	Kota Semarang	300 kop	37.190.000	APBD Kota Semarang		300 kop	46.700.000

	Penilaian Kesehatan Koperasi	KSP / USP yang dinilai kesehatannya	Kota Semarang	300 kop	46.029.000	APBD Kota Semarang		300 kop	57.800.000
	Fasilitasi Hari Koperasi	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaianannya	Kota Semarang	1500 org	419.326.000	APBD Kota Semarang		1500 org	526.558.000
	Fasilitasi Kelembagaan Koperasi	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	Kota Semarang	400 kop	75.072.000	APBD Kota Semarang		400 kop	94.270.000
	Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	Kota Semarang	540 org	122.101.000	APBD Kota Semarang		540 org	153.325.000
	Advokasi Dan Pendampingan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	Kota Semarang	100 kop	25.049.000	APBD Kota Semarang		100 kop	31.455.000
	Fasilitasi Perijinan Koperasi	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	Kota Semarang	120 kop	96.852.000	APBD Kota Semarang		120 kop	121.620.000
	Fasilitasi Informasi Koperasi	Pengembangan data dan informasi koperasi	Kota Semarang	4 keg	99.235.000	APBD Kota Semarang		4 keg	124.612.000
	Peningkatan Kepatuhan Koperasi	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Kota Semarang	100 kop	75.335.000	APBD Kota Semarang		100 kop	94.600.000
	Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	Kota Semarang	150 kop	37.190.000	APBD Kota Semarang		150 kop	46.700.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM		Prosentase Akses Pemasaran	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	23%	3.519.250.000	APBD Kota Semarang		23%	4.419.210.000
	Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	Kota Semarang dan luar daerah	100 UMKM	62.843.000	APBD Kota Semarang		100 UMKM	78.913.000
	Fasilitasi Promosi Produk Umkm	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	Kota Semarang dan luar daerah	300 UMKM	3.388.723.000	APBD Kota Semarang		300 UMKM	4.255.305.000
	Perluasan Akses Pasar	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar	Kota Semarang	100 UMKM	67.684.000	APBD Kota Semarang		100 UMKM	84.992.000

Sumber data: Dinas Koperasi & Usaha Mikro Kota Semarang

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja Bappeda ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021, dimana tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Renstra, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra;
3. Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2021, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan;

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021;

2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang;
3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 untuk setiap triwulannya;
2. Terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, akan dilakukan pemetaan terhadap rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2021; dengan mengacu pada nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut. Adapun hasil pemetaan menjadi lampiran dari dokumen Renja ini.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2021.

Semarang, 2020

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19660427 198603 1 005

LAMPIRAN
PEMETAAN NOMENKLATUR
PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

LAMPIRAN

**PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG TAHUN 2021**

PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR APBD TAHUN 2021		URUSAN, BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90/2019		KETERANGAN
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
00.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
0.00.01.002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK			
	Pembayaran rekening telepon dan listrik	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
0.00.01.006	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.01.010	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR			
	Penyediaan alat tulis kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	
0.00.01.011	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN			
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
0.00.01.014	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA			
	Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
0.00.01.015	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
0.00.01.017	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN			
	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	

0.00.01.018	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH			
	Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	
0.00.01.028	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH			
	Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah			Sesuai. Masuk pada Rincian Belanja sub kegiatan
0.00.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran			
	Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
00.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
0.00.02.007	PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.009	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
0.00.02.024	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL			
	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
0.00.02.026	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
0.00.02.028	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR			
	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.03	Administrasi Umum	
		X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	

00.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
0.00.06.005	PENUNJANG KINERJA PA, PPK, BENDAHARA DAN PEMBANTU			
	Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	
0.00.06.006	PENYUSUNAN LKPJ SKPD			
	LKPJ SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
0.00.06.010	PENYUSUNAN LAKIP			
	Lakip SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	
0.00.06.020	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN			
	Laporan keuangan akhir tahun	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
0.00.06.022	PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN			
	Laporan keuangan semesteran	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan	
		X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
0.00.06.028	PENYUSUNAN RENJA SKPD			
	Renja SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	
0.00.06.029	PENYUSUNAN RENSTRA SKPD			
	Renstra SKPD			
0.00.06.030	PENYUSUNAN RKA DAN DPA			
	RKA dan DPA, DPPA SKPD	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai Sub Kegiatan
		X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	

1.15.00.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH			
1.15.00.16.021	PENGUATAN MUTU PRODUK USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
1.15.00.16.022	PENDAMPINGAN USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.023	PENINGKATAN MANAJEMEN USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.024	PENINGKATAN PEMBINAAN PRODUK USAHA MIKRO UNGGULAN DAERAH			
	Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
1.15.00.16.025	PENINGKATAN KAPASITAS KEWIRAUSAHAAN			
	Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
01.15.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM			
1.15.17.014	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro			
	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan

		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
1.15.00.17.029	FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO			
	Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
1.15.00.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI			
1.15.00.18.016	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI			
	Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

1.15.00.18.017	PENINGKATAN MANAJEMEN PENGAWASAN KOPERASI			
	Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
1.15.00.18.018	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.019	PENINGKATAN PENGENDALIAN KOPERASI			
	Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.021	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI			
	KSP/USP yang dinilai kesehatannya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.022	FASILITASI HARI KOPERASI			
	Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaiannya	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.023	FASILITASI KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.02.4	PEMASYARAKATAN KELEMBAGAAN KOPERASI			
	Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.02.6	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.02.7	FASILITASI PERIJINAN KOPERASI			
	Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

		02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
1.15.00.18.028	FASILITASI INFORMASI KOPERASI			
	Pengembangan data dan informasi koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.18.029	PENINGKATAN KEPATUHAN KOPERASI			
	Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	

1.15.00.18.030	PENGEMBANGAN, Penguatan dan Perlindungan Koperasi			
	Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Keg
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	
1.15.00.21	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM			
1.15.00.21.002	PENINGKATAN PERLUASAN JARINGAN USAHA DAN KEMITRAAN UMKM			
	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
1.15.00.21.005	FASILITASI PROMOSI PRODUK UMKM			
	UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
1.15.00.21.006	PERLUASAN AKSES PASAR			
	UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Sesuai, Masuk Rincian Belanja pada Sub Kegiatan
		02.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	